

Diskursus Islam Nusantara dalam Representasi Media Massa

Muhammad Fahmi¹
fahmielhalimy@gmail.com

Abstract: This study aims to look at how the representation of the Islam Nusantara in the national media in Indonesia, namely *Kompas* and *Republika*. The method used in this study is critical discourse analysis, Theo van Leeuwen, which focuses on how actors are represented in media texts both in the inclusion and the exclusion strategies. This study concludes that, first, *Kompas* tends to support the Islamic discourse of Nusantara, while *Republika* tend to reject the discourse. Further, *Kompas* represents the ideology of pluralism and nationalism, whilst *Republika* tends to present a contestation between the pros and cons of Islam Nusantara. Those who disagree with Islam Nusantara more represent the ideology of scrituralism, whilst those who pros of it tend to reflect traditionalist ideology.

Keywords: media, representation, Islam Nusantara, discourse and ideology

Abstrak: Kajian ini bermaksud melihat bagaimana representasi Islam Nusantara dalam media nasional di Indonesia, yakni Harian *Kompas* dan *Republika*. Melalui analisis wacana kritis, Theo van Leeuwen, yang memusatkan pada bagaimana aktor diinklusi dan dieksklusi pada berita, studi ini menyimpulkan bahwa *Kompas* cenderung mendukung wacana Islam Nusantara, sementara *Republika* cenderung menolak wacana tersebut. Pula, *Kompas* cenderung merepresentasikan ideologi pluralisme dan nasionalisme, sedangkan *Republika* lebih banyak menghadirkan kontestasi antara yang pro dan kontra Islam Nusantara. Para kontra wacana Islam Nusantara di *Republika* sebagai representasi Islam yang murni dan skripturalis, sedangkan para pendukung Islam Nusantara merepresentasikan pandangan kalangan tradisionalis.

Kata Kunci: media, representasi, Islam Nusantara, wacana, ideologi

¹ Dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, FUD IAIN Surakarta.

Pendahuluan

Belakangan ini muncul istilah Islam Nusantara dalam diskursus publik, baik yang dilakukan di forum-forum ilmiah sampai dengan media sosial. Terminologi tersebut kemudian memantik sikap pro-kontra di dalam masyarakat². Ada yang mengamini istilah tersebut dengan argumen bahwa Islam Nusantara bisa menjadi model alternatif bagi dunia Islam yang saat ini, terutama di Timur-Tengah tercabik-cabik dalam konflik dan perang saudara yang tak kunjung usai. Situasi yang relatif aman dan stabil di wilayah nusantara, kontras dengan suasana Timur Tengah yang “panas”, memunculkan optimisme pada sebagian umat Islam di Indonesia bahwa Islam di Indonesia bisa menjadi ---meminjam Max Weber --- *ideal type*, model ideal Islam terkini.

Namun demikian, tidak sedikit pula yang menentang istilah tersebut, karena bagi mereka Islam itu pada hakekatnya hanya satu dan tidak boleh dikotak-kotakan melalui istilah Islam Nusantara. Sebab istilah Islam Nusantara menyiratkan bahwa Islam seakan-akan mempunyai banyak versi. Padahal ajaran Islam berasal dari satu sumber,

² Pemunculan istilah ‘Islam Nusantara’ yang diklaim sebagai ciri khas Islam di Indonesia, yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan bertolak belakang dengan ‘Islam Arab’ telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan penganut Islam di Indonesia. Walaupun dianggap bukan hal baru, istilah Islam Nusantara belakangan telah dikampanyekan secara gencar oleh Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Dalam pembukaan acara *istighotsah* menyambut Ramadhan dan pembukaan Munas Alim Ulama NU, Minggu (14/06) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, bahwa NU akan terus memperjuangkan dan mengawal model Islam Nusantara. “Yang paling berkewajiban mengawal Islam Nusantara adalah NU,” kata Said Aqil, yang dibalas tepuk tangan ribuan anggota NU yang memadati ruangan dalam Masjid Istiqlal (Affan, 2015). Semantara, Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia juga mempertanyakan sikap yang memperhadapkan konsep Islam Nusantara dengan Islam di Timur Tengah yang dianggap tidak tepat. “Agak kurang fair kalau membandingkan Timur Tengah sekarang dengan Indonesia pada tahun 2015,” kata Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto (Affan, 2015). Menurutnya, yang terjadi saat ini di sejumlah negara di wilayah Timur Tengah, misalnya Suriah, adalah proses perlawanan melawan penguasa lalim. Dia juga menyebut tidak ada perbedaan antara Islam di Indonesia dan Timur Tengah dalam kerangka “melawan penguasa dictator (Affan, 2015).

yaitu agama yang dulu dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., yang kemudian menyebar ke penjuru dunia, termasuk di wilayah nusantara (Huda, 2007; Azra, 2002).

Sementara itu, hiruk-pikuk soal dukung-mendukung wacana Islam Nusantara begitu menyolok di media sosial³. Bahkan, pro dan kontra tersebut juga mengarah ke arah *hate speech*. Berbeda halnya dengan media massa, karena harus menjalankan prinsip jurnalistik, *cover both side*⁴, mereka cenderung memberitakan Islam Nusantara secara berimbang. Akan tetapi, jika mengamati secara lebih seksama akan terlihat sikap, kepentingan dan ideologi media⁵. Artinya, di balik representasi Islam Nusantara dalam media-media tersebut terdapat selubung kepentingan dan ideologi media. Indikatornya dapat terlihat pada kecenderungan media-media nasional non-keagamaan yang cenderung lebih mendukung wacana Islam Nusantara⁶, sementara media-media Islam kaum skripturalis cenderung menolak wacana tersebut.

Ulama kharismatik asal Cirebon, Buya Yahya memberikan pandangan soal Islam Nusantara yang sedang marak dibicarakan saat ini. Seperti dikutip dari *Suara Islam Online*, Buya mengatakan bahwa secara istilah Islam Nusantara sebenarnya tidak ada masalah, akan tetapi saat ini sedang digunakan sebagian orang untuk tujuan jahat, katanya saat ditemui di Masjid Raya Bogor. "Islam Nusantara yang

³ Islam nusantara sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ada yang pro dan ada yang kontra. Diskusi mulai dari yang ringan hingga yang keras mengemuka (Edwin, 2015).

⁴ *Cover both side* dalam terminologi jurnalistik secara sederhana berarti berimbang, tidak memihak, netral. Karena itu, *cover both side* adalah kosa kata dengan makna sangat penting dalam dunia jurnalistik (Iriantara, 2005, hlm. 166).

⁵ Media massa hampir selalu berada dalam impitan dua kepentingan. Kepentingan bisnis Dan kepentingan idealisme. Di tengah dua kepentingan itu sangat sulit bagi konsumen pers mengharap sajian media massa yang tidak berpihak (Ali, 2010).

⁶ Harian umum *Kompas* misalnya, dengan mengutip pendapat Said Aqil Siroj, menyatakan Islam Nusantara adalah Islam yang sudah paripurna karena terbentuk dari dialog antarbudaya di berbagai peradaban besar dunia, seperti Persia, Turki, India, Cina, Siam, dan peradaban lainnya. Sikap mendukung harian *Kompas* ini dapat terlihat dalam artikel yang berjudul 'Islam Nusantara, Islam Damai untuk Dunia' (Kustiasih, 2016).

dibangun oleh Walisongo dengan penuh kelembutan keindahan, dan Walisongo yang *manhajnya* kembali kepada ulama Hadromaut itu jelas indah bukan ekstrim. Cuma istilah ini sedang digunakan orang liberal, jadi ini penjahatnya," (Buya Yahya, 2015, para. 3). "Maka lebih bijak tidak menggunakan istilah Islam Nusantara itu karena banyak penjahatnya," tegas Buya (Para.10).

Dari sini dapat diasumsikan bahwa dalam pemberitaan tentang Islam Nusantara di media telah dan sedang berlangsung suatu "operasi ideologi". Artinya, media memang secara sadar digunakan oleh *stake holder* media untuk menggiring opini publik⁷ untuk menolak atau mempromosikan Islam Nusantara⁸. Lebih lanjut hal tersebut akan menjadi fokus bahasan pada tulisan ini.

Dalam buku Stuart Hall (2003) yang berjudul *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices* digambarkan bahwa media massa merupakan

Kajian
Teoretik

⁷ Cangara (2009) menyatakan bahwa penonjolan atas isu yang berbeda bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *opini publik*. Media tidak saja tergantung pada berita kejadian (*news event*), tetapi ia berperan dalam *menggiring* orang melalui agenda-agenda yang bisa mendukung atau menolak pikiran tertentu semisal diskursus Islam Nusantara tersebut.

⁸ Hal ini tentu saja bertentangan dengan salah satu fungsi media yaitu untuk melakukan transformasi sosial (Panuju. 2002). Dengan melakukan operasi ideologi, media bukannya mencerdaskan publik tetapi justru akan membodohi publik karena mengecek masyarakat dengan "kesadaran palsu" (*false consciousness*). Teriminologi *false consciousness* dimaknai kesadaran palsu. istilah yang digunakan oleh sosiolog dan kalangan Marxis untuk menggambarkan bagaimana proses material, ideologi, dan kelembagaan dalam masyarakat kapitalis menyesatkan anggota proletariat dan aktor kelas yang lain. Proses ini diperkirakan menyembunyikan hubungan yang benar antara kelas dan keadaan sesungguhnya urusan mengenai eksploitasi yang diderita oleh kaum proletar. Dalam konteks ini, istilah ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana media menyesatkan audiens dengan menyembunyikan motif, ideologi dan kepentingan media dalam pemberitaan (Eagleton, 1991, hlm. 89).

media yang paling sering digunakan dalam proses produksi dan pertukaran makna antara manusia atau antar budaya dengan cara menggunakan gambar, simbol dan bahasa. Dalam bukunya yang berjudul *Media Discourse: Representation and Interaction*, Talbot (2007) menggambarkan bagaimana wacana media tidak bisa dilepaskan dari kaitannya dengan proses dan interaksi sosial yang terdapat dalam media maupun di luar media. Hal itu senada dengan pendapat Fairclough (1992) dalam bukunya yang berjudul *Discourse and Social Change*, yang menyatakan bahwa terjadi *interplay* antara teks dan konteks. Karena itu, wacana merupakan sebuah praktik sosial.

Sementara itu, Menurut Fiske (1997) dalam bukunya yang berjudul *Television Culture*, dalam sebuah praktek representasi asumsi yang berlaku adalah bahwa isi media tidak merupakan murni realitas. Oleh karenanya, representasi lebih tepat dipandang sebagai cara bagaimana mereka membentuk versi realitas dengan cara-cara tertentu bergantung pada posisi sosial dan kepentingannya. Antonio Gramsci (1971) dalam buku *Selection from Prison Notebooks* menganalisa berbagai relasi kekuasaan dan penindasan di masyarakat. Lewat perspektif hegemoni yang diperkenalkannya, terlihat bahwa berita media massa merupakan alat kontrol kesadaran yang dapat digunakan kelompok penguasa. Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah sehingga menjadi konsensus publik. Louis Althusser (2008) dalam bukunya yang berjudul *Essays on Ideology* merumuskan bagaimana satu ideologi dibentuk, dibakukan, dan disebarluaskan lewat institusi sosial. Salah satu institusi tersebut adalah media massa.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, yaitu analisis wacana dari Theo van Leeuwen yang

memusatkan pada aktor. Analisis ini memusatkan pada bagaimana para aktor ditampilkan (inklusi) atau dikeluarkan (eksklusi) dalam sebuah pemberitaan, bagaimana suatu kelompok atau seseorang diangkat atau dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar dari tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1. Teknik Eksklusi dan Inklusi yang dimodifikasi (Khuriyati, 2013)

Teknik	Yang ingin dilihat
Eksklusi	a. Apakah ada penghilangan aktor dalam pemberitaan? (Pasivasi).
	b. Apakah ada upaya media untuk mengedepankan aktor tertentu dan menghilangkan aktor lain? (Nominalisasi)
	c. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menghilangkan aktor sosial tersebut? Apakah subjek atau aktor dihilangkan dengan memakai anak kalimat? (Penggantian Anak Kalimat)
Inklusi	a. Bagaimana para aktor ditampilkan dalam teks berita secara berbeda? (Diferensiasi/indeferensiasi)
	b. Apakah suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkrit? (Objektivasi/Abstraksi)
	c. Apakah aktor ditampilkan apa adanya atau media mengkategorisasi aktor tersebut? (Nominasi/Kategorisasi)
	d. Apakah aktor digambarkan dengan identitas buruk atau stereotype tertentu? (Nominasi/Identifikasi)
	e. Apakah peristiwa atau aktor ditampilkan dengan jelas atau tidak (anonim)? (Determinasi/Indeterminasi)

Sedangkan objek penelitian ini dibagi dua. *Pertama*, objek formal, yaitu representasi Islam Nusantara. Artinya, bagaimana media-media di Indonesia merepresentasikan Islam dan ideologi apa yang ada di balik konstruksi wacana atau *discourse* kedua media tersebut. *Kedua*, objek material, yaitu artikel berita (*news*) yang terkait dengan berita Islam Nusantara yang muncul di surat kabar *Kompas* dan *Republika*. Data diambil dengan cara memilih beberapa artikel terkait dengan berita Islam Nusantara pada surat kedua surat kabar tersebut. Kemudian artikel tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis wacana Van Leeuwen yang secara umum bertujuan untuk melihat pihak-pihak

dan aktor, seseorang atau kelompok atau para pihak ditampilkan dalam pemberitaan (Leeuwen, 1996).

Hasil dan Pembahasan

Data dalam tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana kedua media massa nasional yaitu Surat kabar *Kompas* dan Surat kabar *Republika* merepresentasikan Islam Nusantara. Pada surat-kabar *Kompas* ditemukan dua ideologi yaitu, ideologi pluralisme dan nasionalisme. Sedangkan pada surat-kabar *Republika* juga terdapat dua ideologi, yaitu skripturalisme dan tradisionalisme. Beberapa temuan tersebut lebih lanjut akan dibahas satu per satu.

Tabel 2. Wacana Islam Nusantara dalam *Kompas*

No	Representasi	Eksklusi	Inklusi	Konstruksi Teks
1.	Pluralisme	-	Positif	Ramah, terbuka, toleran, lembut,
2.	Nasionalisme	-	Positif	Paripurna, bisa diteladani, obat radikalisme, berkembang alami di Nusantara, kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia.

Tabel 3. Wacana Islam Nusantara dalam *Republika*

No	Representasi	Eksklusi	Inklusi	Konstruksi Teks
1	Skripturalisme	-	Negatif	• Islam Nusantara berbeda dengan Islam Arab Saudi • Islam Arab Saudi... Islam literal dan 'murni'. • Islam Arab Saudi, muslimin lain dianggap sebagai

No	Representasi	Eksklusi	Inklusi	Konstruksi Teks
				pelaku <i>bid'ah dhalalah</i> yang bakal masuk neraka. • <i>Bid'ah dhalalah</i> itu.. Maulid Nabi Muhammad Saw..., yang dirayakan Indonesia.... • Tasawuf ditolak karena <i>bid'ah dhalalah</i>. • Muslim Indonesia gemar mempraktikkan tasawuf.
2	Tradisionalisme	-	Positif	• Islam Salafi-Wahabi Arab Saudi terlalu kering dan sederhana bagi kaum Muslimin Nusantara. • Muslimin Nusantara ..menjalani warisan tradisi Islam yang kaya nuansa.. dengan 'ritual' <i>.tahlilan</i>, nyekar atau ziarah kubur, <i>walimatus-safar (walimatul hajj/umrah)</i>, <i>walimatul khitan</i>, tasyakuran, sampai empat bulanan atau tujuh bulanan kehamilan.

1. Pluralisme

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa harian *Kompas* telah memanfaatkan isu Islam Nusantara untuk mendiseminasi ideologi pluralisme. Pluralisme (bahasa Inggris: pluralism), terdiri dari dua kata plural (=beragam) dan isme (=paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralisme dipahami sebagai kata benda, yaitu keadaan masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan 1). Sistem sosial dan politiknya; 2). Kebudayaan; berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat (Departemen Pendidikan Nasional, 2016). Sementara, pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, yaitu berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan pula (Bagus, 2006). Jhon Hick (dikutip dari Bagus, 2006, hlm. 853) mengatakan terminologi pluralisme agama adalah sebuah realitas, bahwa sejarah agama-agama menunjukkan berbagai tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama.

Indikatornya dapat dilihat dari bagaimana media ini mengonstruksi Islam Nusantara sebagai Islam yang ramah, terbuka, toleran, lembut. Hal itu sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini: "...Islam Nusantara yang mengakomodasi budaya serta ramah dan terbuka pada pandangan yang lain...", (Kustiasih, 2016, para. 22). Pada konstruksi teks tersebut terlihat kata kunci: ramah dan terbuka menjadi sarana *Kompas* untuk mempromosikan ideologi pluralisme⁹. Kata ramah berposisi biner¹⁰ dengan kata seperti tidak

⁹ Menurut McGrath (1992, hlm. 361), pluralisme sebagai suatu ideologi adalah suatu kepercayaan bahwa pluralisme ini didukung serta diinginkan, dan bahwa klaim-klaim normatif yang berbau imperialistik serta bersifat memecah belah perlu dibuang.

¹⁰ Oposisi biner adalah sebuah sistem yang membagi dunia dalam dua kategori yang saling bertentangan (oposisi). Dalam struktur oposisi biner yang sempurna, segala sesuatu dimasukkan dalam kategori A maupun kategori B, dan dengan memakai pengkategorian itulah, kita mengatur pemahaman dunia di luar kita. Dalam sistem biner, hanya ada dua tanda atau kata yang hanya punya arti jika masing-masing berposisi dengan yang lain. Konsep oposisi biner mula-mula diteorisikan oleh ahli

ramah, tidak *welcome*, arogan, benci dan kata sejenis yang intinya bertentangan dengan kata ramah. Pilihan kata ini bukan tanpa maksud, *Kompas* menyadari bahwa secara empiris, di Indonesia ada komunitas-komunitas keagamaan tertentu yang ‘berwajah sangar’ dan tidak ramah kepada keyakinan dan nilai-nilai orang lain. Sikap seperti ini dianggap akan mengancam integrasi sosial¹¹.

Sebaliknya, sikap ramah dipandang sebagai prasyarat untuk bisa menjaga kebinekaan masyarakat Indonesia. Sementara, sikap terbuka untuk bisa menerima segala perbedaan menjadi syarat penting bagi sebuah bangsa yang majemuk. Kemajemukan agama adalah sebuah keniscayaan, dan karenanya perlu dijaga. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Lesslie Newbiggin (dikutip dari Sulistio, 2001, hlm. 51)

“Kita sudah terbiasa mengatakan bahwa kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk—bukan hanya masyarakat yang pada kenyataannya majemuk dalam bermacam-macam kebudayaan, agama, dan gaya hidup, tetapi juga majemuk dalam arti bahwa kemajemukan ini dirayakan sebagai perkara yang disepakati dan dihargai”.

Menurut *Kompas*, modal sosial tersebut sebenarnya sudah ada di dalam masyarakat Indonesia, salah satunya dapat dilihat pada apa yang dilakukan NU sebagai insiator “Islam Nusantara”. Hal tersebut terlihat dari kutipan berikut “...Dengan landasan berpikir yang ramah dengan budaya dan kearifan lokal, NU menawarkan dialog yang saling menerima dan terbuka”. Dengan demikian keramahan dan keterbukaan sikap serta mengutamakan dialog sebagai mana yang dipraktekkan oleh NU selama ini diharapkan *Kompas* bisa menjadi *role model* dari pluralisme di Indonesia.

bahasa Ferdinand de Saussure. Bagi Strauss, oposisi biner adalah ‘*the essence of sense making*’: struktur yang mengatur sistem pemaknaan kita terhadap budaya dan dunia tempat kita hidup (Ahimsa-Putra, 2001; Pilliang, 2003).

¹¹ Menurut Baton, dalam Kamanto Sunarto (2000, hlm.154) yang menyatakan bahwa integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan pada ras tersebut.

Di samping ramah dan terbuka, harian *Kompas* juga mempromosikan nilai-nilai pluralisme yang lainnya yaitu, toleran. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

“...Santri lulusan pesantren NU tidak anti budaya dan karena itu relatif toleran. Sebab, mereka dibekali pemahaman bahwa budaya yang berbeda-beda adalah kenyataan sekaligus bagian dari keunikan Tanah Air yang harus dijaga....”

Kata “toleran” yang merupakan kata benda dan kata “toleransi” sebagai kata kerja juga sering digunakan di dalam masyarakat kita. Namun demikian, dalam kutipan di atas, *Kompas* menggunakan kata “toleran”. Toleran yang merupakan unsur penting dari pluralisme. Pada titik ini cukup jelas, bahwa pesan (*message*) yang ingin disampaikan *Kompas* adalah bahwa toleran bagian dari strategi untuk menjaga Tanah Air. Artinya, jika ingin Indonesia langgeng sebagai sebuah bangsa, maka tidak bisa tidak, sikap toleran harus dijaga. Inilah poin penting dari struktur konstruksi teks *Kompas* di atas. *Kompas* berkepentingan untuk terus mendiseminasi kesadaran pluralistik ini dan melihat Islam Nusantara sebagai sebuah modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia. Bagaimanapun, meski mengklaim sebagai media umum, *Kompas* sulit melepaskan diri dari anggapan sebagai media milik kalangan non-muslim yang minoritas, karenanya media ini sangat berkepentingan agar ideologi pluralisme, yang salah satu *value*-nya adalah penghargaan atas hak minoritas, bisa membumi di Indonesia.

2. Nasionalisme

Di samping mengandung ideologi Pluralisme, harian *Kompas* melalui wacana Islam Nusantara, juga mempromosikan ideologi Nasionalisme. Hal tersebut sebagaimana tampak dari kutipan berikut di bawah ini:

“...Islam Nusantara adalah Islam yang sudah paripurna karena terbentuk dari dialog antarbudaya di berbagai peradaban besar dunia, seperti Persia, Turki, India, Cina, Siam, dan peradaban lainnya...”

Dari konstruksi teks di atas terlihat bagaimana klaim ‘sudah paripurna’ yang itu ditujukan untuk Islam Nusantara dikonstruksi sedemikian rupa oleh *Kompas*. Media ini berargumentasi bahwa karena terbentuk dari dialog pelbagai peradaban besar dan peradaban lainnya, maka Islam Nusantara menyerap pelbagai kebaikan-kebaikan (*wisdom*) dari peradaban-peradaban tersebut, sehingga layak untuk disebut sebagai model yang ‘paripurna’. Bahkan, *Kompas* mengklaim, model ini kemudian bisa menjadi *role model* atau *proto-type* Islam yang ideal yang bisa diteladani Negara Islam lain di tengah situasi buruk dan citra negatif yang dialami oleh pelbagai negara Islam yang terkoyak oleh perang saudara dan instabilitas politik dan keamanan. Hal tersebut bisa dilihat pada kutipan di bawah ini:

“.....Islam Nusantara ini sebagai wawasan dan perspektif baru yang bisa diteladani negara Islam untuk mewujudkan Islam yang damai,”
... adalah obat bagi penyakit radikalisme dan terorisme yang saat ini acap kali dikait-kaitkan dengan Islam...”

Pada titik ini bisa dikatakan bahwa, media ini berusaha mendesiminasikan ideologi Nasionalisme dengan mempromosikan Islam Nusantara, Islam Indonesia, sebagai *role model* dan *ideal type* Islam yang paripurna, dan karenanya bisa menjadi contoh dan teladan bagi negara-negara Islam lain. Bahkan model ini diyakini dapat dijadikan sebagai formula untuk mereduksi radikalisme dan terorisme. Artinya, *Kompas* ingin mendiseminasi ideologi nasionalisme dengan menghadirkan rasa bangga pada Islam Indonesia, yaitu Islam Nusantara, karena ia sudah paripurna, menjadi teladan bahkan menjadi formulasi handal untuk mengatasi radikalisme dan terorisme. Bahkan, rasa bangga atau nasionalisme tersebut dibuat klimaks oleh media ini dengan mengatakan bahwa “...Islam Nusantara sebagai kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia.”

3. Skripturalisme

Berbeda dengan *Kompas* yang mengusung pluralisme dan nasionalisme, surat kabar *Republika* tampak lebih merepresentasikan

ideologi skripturalisme¹². Hal ini sebagaimana yang terlihat pada kutipan di bawah ini:

“...Islam Nusantara ini berbeda dengan ortodoksi Islam Arab Saudi.... ortodoksi Islam Arab Saudi mengandung hanya dua unsur, yaitu pertama, kalam (teologi) Salafi-Wahabi dengan pemahaman Islam literal dan penekanan pada Islam yang 'murni'.

Pada teks di atas kita bisa melihat bagaimana Republika *me- liyan-*kan Islam Nusantara dengan melakukan oposisi biner, dengan Islam Arab Saudi yang dikatakan literal dan karena itu layak disebut sebagai ‘Islam yang murni’. Artinya, media ini secara implisit hendak mengatakan bahwa Islam Nusantara karena ‘tidak literal’ maka juga berarti ‘tidak murni’. Dengan demikian, ada indikasi untuk mengedepankan Islam Arab Saudi, yang literal dan murni dan sebaliknya mensub-ordinasi Islam Nusantara karena berkebalikan dengan Islam Nusantara: tidak literal dan tidak murni. Pilihan *Republika* tersebut mengindikasikan pengaruh skripturalisme dalam media tersebut. Dan, karenanya wacana Islam Nusantara, dihegemoni ideologi skripturalisme yang selama ini selalu ditabalkan pada pundak Islam Arab Saudi (Ernest Gellner 1995, hlm. 65).

Indikasi pengaruh dari ideologi ini juga dapat dilihat pada kutipan berikut ini:

“...Islam Arab Saudi tidak mencakup tasawuf, justru tasawuf ditolak karena dianggap mengandung banyak *bid'ah dhalalah*...”

Pada teks di atas terlihat bagaimana media ini tidak hanya mengkritik ajaran tasawuf yang banyak dipraktikkan dalam Islam Nusantara, bahkan dikatakan sebagai *bid'ah dhalalah*. Bid'ah yang memiliki pengertian sebagai sebuah perbuatan dalam kaitannya iba-

¹² Dalam pengertian yang lebih jelas dikatakan bahwa skripturalisme adalah keyakinan harfiah total terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan. Dengan demikian dalam aplikasinya, skripturalisme memandang bahwa teks wahyu satu agama harus dipegang kokoh dalam bentuk literel dan bulat, tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi dan pengurangan. Lihat, Hamim Ilyas, dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk. (2004, hlm. 126).

dah yang tidak ada dasar skriptural: tidak punya dalil atau sandaran nash secara literal, dan karenanya dikatakan sebagai perbuatan yang ‘menambah-nambah’ (*bid’ah*). Tidak sampai di situ, *bid’ah* tersebut dikatakan sebagai *dhalalah*, yaitu tercela dan sesat. Dengan demikian, tasawuf bukan hanya tidak punya dasar *nash* atau dalil, tapi juga sudah masuk kategori praktik ibadah yang sesat dan karenanya harus ditolak. Bahkan oleh media ini dikatakan bahwa karena sesat maka layak masuk neraka, sebagai terlihat dari teks berikut “... Muslimin lain dianggap sebagai pelaku *bid’ah dhalalah* yang bakal masuk neraka...” Dengan demikian, terlihat jelas bagaimana konstruksi teks harian *Republika* mengandung bias ideologi skripturalisme, dimana terdapat relasi dominasi-subordinansi yaitu men-supermasi Islam Arab Saudi dan mensubordinasi Islam Nusantara.

4. Tradisionalisme

Republika terlihat juga dipengaruhi oleh paham tradisionalisme¹³. Tradisionalisme Islam, berbeda dengan skripturalisme yang menyandarkan diri sepenuhnya pada teks, membuka diri pada ekspresi-ekspresi lokal yang bahkan sekalipun tidak mempunyai kaitan dan rujukan dengan teks-teks normatif agama tetapi karena dianggap bisa digunakan sebagai bagian dari strategi dakwah maka tradisi diterima bahkan diambil. Cara ini sebagaimana yang digunakan para Walisongo ketika menyebarkan Islam di Jawa, mereka bukannya menolak tradisi tapi justru mengambil dan menggunakannya untuk melancarkan dakwah mereka. Cara ini, yaitu meng-

¹³ Istilah ini berasal dari kata Latin *trader* yang berarti *menyerahkan, menyampaikan, meneruskan, memberikan*. Kata bendanya dalam *traditio* yang berarti *hal yang diserahkan, disampaikan, diteruskan, dibeikan*. Lihat, AM. Hardjana (1993, hal. 29). Paham Tradisionalisme itu sendiri berasal dari perenialisme, sebuah aliran keagamaan dan filosofis yang didirikan di Florence pada masa Reneisans. Lihat *Tempo* (2005, Volume 34, Issues 44-48 – hlm. 44. Kata tradisi yang dipahami umum sampai sekarang ini, masih lebih banyak berkonotasi negatif. Banyak yang enggan disebut manusia tradisional. Tradisionalisme bagi mereka adalah paham yang kolot dan ketinggalan zaman, tidak layak bagi orang-orang modern. Lihat, *Ulumul Qur'an* (1992, Volume 3, hlm. 3).

gunakan tradisi dan adat-istiadat yang berlaku di dalam masyarakat, dinilai efektif dalam menyebarkan Islam sehingga menjadi agama mayoritas di Jawa.

Di samping itu, tradisionalisme juga sering merujuk pada tradisi di pesantren-pesantren terutama di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), yang menjalankan praktek Tahlilan, Shalawatan, Ziarah Kubur dan sebagainya. Dalam pengelompokan kasar umat Islam di Indonesia sering dibagi pada dua kelompok besar yaitu NU dan Muhammadiyah. NU diasumsikan sebagai kelompok tradisional (Baso, 2006, hlm. 168; Sholeh, 2004; Richard, 1999, hlm. 203; Barton & Fealy, 1996). Sedangkan Muhammadiyah seringkali dipandang sebagai kelompok modernis (Ismail, 1997, hlm. 82; Ricklefs, 1991, hlm. 58-59; Alfian, 1989, hlm. 150-151; Fauzan Shaleh, 2001, hlm. 84). Meski pengkategorian ini sangat simplistik akan tetapi sedikit banyak bisa membantu untuk memahami tentang paham tradisionalisme ini. Tradisionalisme berbeda dengan skripturalisme yang super ketat berpegang pada teks literal *nash* al-Qur'an maupun al-Hadist sebagai sumber rujukan dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Pada tradisionalisme ada kelenturan untuk menginterpretasikan *nash* dan juga kelonggaran dalam mengambil sumber-sumber lain di luar *nash*, termasuk di dalamnya tradisi dan adat, sebagai sumber referensi kehidupan sosial-keagamaan seorang Muslim sepanjang tidak bertentangan dengan *nash* dan mempunyai nilai manfaat. Hal itu, sebagaimana tradisi Tahlilan, yang bagi kalangan skripturalis dianggap tidak punya dasar dan malah dinilai berasal dari tradisi Hindu-Budha, justru diadopsi di kalangan tradisionalis karena dianggap mempunyai nilai manfaat, seperti mempererat silaturahmi, mendukung bacaan-bacaan yang baik (*kalimah thayyibah*) ; zikir, tahlil, dsb.

Terkait dengan hal di atas, hegemoni tradisionalisme Islam dalam surat kabar *Republika* juga dapat dilihat pada kutipan berikut di bawah ini:

“..Ortodoksi Islam Salafi-Wahabi Arab Saudi terlalu kering dan sederhana bagi kaum Muslimin Nusantara.”

Pada kutipan di atas terlihat bagaimana harian ini berusaha menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik yang dalam konteks ini adalah *cover both side*. Dengan merepresentasikan Islam tradisional, *Republika* berusaha untuk mengesankan netral dan berimbang. Karena itu, media ini tampak juga mengangkat suara kalangan tradisionalis yang menilai ortodoksi Arab Saudi terlalu kering dan kaku. Padahal Muslimin Nusantara, telah mempraktikkan ajaran Islam yang kaya nuansa. Hal tersebut sebagaimana yang diberitakan media ini yaitu:

“...Umat Muslimin Nusantara telah dan terus menjalani warisan tradisi untuk mengamalkan Islam yang kaya dan penuh nuansa....sebagai 'Islam berbunga-bunga' (flowery Islam) dengan 'ritual' sejak tahlilan, nyekar atau ziarah kubur, walimatus-safar (walimatul haj/umrah), walimatul khitan, tasyakuran, sampai empat bulanan atau tujuh bulanan kehamilan”.

Dengan demikian, dari konstruksi teks surat kabar *Republika* sebagaimana di atas seakan mengesankan bahwa media ini netral-netral saja dalam melihat keberadaan Islam Nusantara. Sebab, kedua belah pihak baik yang kontra dan pro Islam Nusantara sama-sama diberi ruang dalam pemberitaan media di atas. Hanya saja, jika kita lebih kritis, akan terlihat bahwa media ini lebih cenderung pada sikap kontra terhadap Islam Nusantara. Bahwa mereka berupaya agar terlihat berimbang adalah bukan semata hendak melaksanakan prinsip jurnalistik yang harus berimbang, tapi juga ada didorong oleh pertimbangan komersial, bahwa mereka adalah juga sebagai industri. Sebagai industri, apa yang disebut Weber sebagai rasionalisme kalkulatif, kalkulasi untung-rugi tentu adalah sebuah keniscayaan (Max Weber dan R. Swedberg (ed), 1999, hal. 73). Maka, pada titik ini, media dapat dikatakan tidak rasional, jika memperhitungkan konteks segmen penganut Islam tradisional yang jumlahnya cukup besar di Indonesia. Pada titik inilah dapat dikatakan bahwa sebagaimana yang dikatakan Fairlough (1995) bahwa teks-teks media mempunyai relasi dengan konteks sosial. Ada *interplay* antara teks dan konteks.

Dalam hal ini, *Republika* tidak bisa mengabaikan keberadaan NU dan kalangan tradisionalis yang merupakan mayoritas di kalangan Islam di Indonesia --- yang secara bisnis juga pasar yang besar bagi media ini. Oleh karena itu, media ini juga memberitakan suara kalangan tradisionalis, NU, yang merupakan penyokong terbesar Islam Nusantara. Di samping itu, dari segi *exclusion* dan *inclusion* berita terlihat bagaimana harian *Republika* lebih berposisi dan cenderung merepresentasikan kalangan yang kontra *Islam Nusantara*. Hal ini terlihat bagaimana media ini menampilkan subjek yang terkait pengkritik *Islam Nusantara* secara jelas. Misalnya Arab Saudi yang dikatakan Islamnya lebih murni dan lebih literal. Sementara Islam Nusantara dikatakan banyak melakukan praktik *bid'ah*. Adapun jika muncul representasi positif, mengangkat *Islam Nusantara* dengan tradisionalitasnya sebagaimana di atas, terlihat media ini tidak menyertai dengan jelas dan contoh konkrit. Media ini hanya menyatakan Islam Arab Saudi kering, sementara Islam Nusantara kaya nuansa. Bandingkan ketika mengangkat Islam Arab Saudi sangat jelas dan konkrit; Murni, Literal. Dengan demikian, meski berusaha untuk berimbang dalam pemberitaan, *Republika*, terlihat lebih didominasi ideologi skripturalisme, atau kubu yang menentang wacana Islam Nusantara. Sebaliknya, media ini terlihat meliyan-kan Islam Nusantara.

Referensi

- Affan, H. (2015, Juni 15). Polemik di balik istilah 'Islam Nusantara'. *BBC Indonesia*. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara.
- Ahimsa, P. & Heddy, S. (2001). *Strukturalisme Levi-Strauss; Mitos dan karya sastra*. Yogyakarta: Galang Press.
- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: The political behavior of muslim modernist organization under the dutch colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Ali, N. (2010, 15 Juli). Ideologi media massa. *Kompas*, hlm. 4.
- Althusser, L. (2011). *Ideology and ideological states apparatuses (notes towards an investigation)*. UK; Wiley-Blackwell Publication.
- Amir, P.Y. (2003). *Hipерsemiotika: Tafsir cultural studies atas matinya makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Artz, L., & Kamalipour, Y.R. (Eds.) (2003). *The globalization of corporate media hegemony*. New York: State University of New York Press.
- Asmaradhana, U. (2008). *Pengkhianatan jurnalis: Sisi gelap jurnalisme kita*. Jakarta Institut Studi Arus Informasi.
- Azra, A. (2015, Juni 17). Islam nusantara (1). *Republika*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1>.
- Azra, A. (2002). *Islam nusantara: Jaringan global dan lokal*. Bandung: Mizan.
- Bagus, L. (2006). *Kamus filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Baker, R.W. (1999). *Indonesia: The challenge of change*. Leiden, Netherlands: KITLV Press.
- Barton, G. & Fealy, G. (1996). *Nahdlatul Ulama, traditional Islam and modernity in Indonesia*. Clayton: Monash Asia Institute.
- Batubara, S.L. (2007). *Menegakkan kemerdekaan pers: Kumpulan makalah 1999-2007*. Jakarta: Dewan Pers.
- Buya Yahya: Islam Nusantara digunakan untuk tujuan jahat. (2015, September 12). Diakses dari (<http://www.fpi.or.id/2015/09/buya-yahya-islam-nusantara-digunakan.html>).
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi politik: Konsep, teori, dan strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke 3). Jakarta: Balai Pustaka.
- Edwin, N. (04 Juli 2015). Ramai di media sosial, ini penjelasan PBNU tentang Islam Nusantara. *Detik News*. Diakses dari

<http://news.detik.com/berita/2960280/ramai-di-media-sosial-ini-penjelasan-pbnu-tentang-islam-nusantara>.

Eagleton, T. (1991). *Ideology: an Introduction*. London: Verso.

Gellner, E. (1995). *Muslim society*. New York: Cambridge University Press.

Habib Rizieq: Inilah kesesatan jemaat Islam Nusantara (2015). Diakses dari <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/habib-rizieq-inilah-kesesatan-islam-nusantara.htm#.zV3nbzaI0IM>.

Hardjana, A.M. (1993). *Penghayatan agama: yang otentik & tidak otentik*. Yogyakarta: Kanisius.

Hartiningsih, M. (2002) *Jurnalisme damai: Media massa untuk transformasi sosial*. Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan- Britis Council.

Hidayat, D. N. (2000). *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya sebuah hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Huda, N. (2007). *Islam Nusantara: Sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Ilyas, H. (2004). Akar fundamentalisme dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Dalam Agus Maftuh Abegebril & A. Yani Anshori Abeveiro, (ed.), *Negara tuhan, the thematic encyclopedia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Iriantara, Y. (2005). *Media relation: Konsep, pendekatan, dan praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Ismail, I.Q. (1997). *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press.

Kustiasih, R. (13 Mei 2016). Islam Nusantara, Islam damai untuk dunia. *Kompas*. diakses dari (<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/13/11394491/Islam.Nusantara.Islam.Damai.untuk.Dunia?page=all>).

- Lentner, H.H., & Haugaard, M. (Eds.). (2006). *Hegemony and power, consensus and coercion in contemporary politics*. Oxford: Lexington Books.
- McGrath, A. (1992). The challenge of pluralism for the contemporary christian church. *JETS* 35(3) hlm. 361.
- Panuju, R. (2002). *Relasi kuasa negara, media massa dan publik: Pertarungan memenangkan opini publik dan peran dalam transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, M.C. (Ed). (1991). *Islam in the Indonesia social context*. Clayton: Monash University Centre of Southeast Asia Studies.
- Shaleh, F. (2001). *Modern trends in Islamic theological discourse in 20th century Indonesia: a critical survey*. Leiden: Brill.
- Sulistio, C. (2001) Teologi pluralisme agama John Hick: Sebuah dialog kritis dari perspektif, partikularitas. *Veritas*, 2(1), 51-69.
- Sunarto, K. (2000). *Pengantar sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Weber, M., & Swedberg, R. (Eds). (1999). *Essays in economic sociology*. Princeton New Jersey: Princeton University Press.